

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan kinerja pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat kemiskinan. Beberapa studi menjelaskan bahwa apabila tingkat kemiskinan tinggi maka menggambarkan kesejahteraan penduduk yang rendah kemudian keadaan tersebut memberikan dampak negatif terhadap beberapa aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, dan budaya (Adnan and Amri, 2020). Disamping itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di New York pada tanggal 25 September 2015, sebanyak 190 negara menyetujui kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai *SDG's*, yang merupakan cita-cita untuk tahun 2030. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip dan kesetaraan. Maka dari itu, berbagai program pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sejak 2018 hingga 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan fluktuasi, namun secara keseluruhan cenderung menurun, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini. Penurunan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2018-2019 dan 2020-2022. Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan pada 2020 karena adanya pandemi covid-19. Tingkat kemiskinan tahun 2020 meningkat 0,97 % dari tahun 2019 sebesar 9,22% menjadi 10,19%. Ini adalah gambar yang

menggambarkan perkembangan tingkat penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, data diolah 2023

Dilihat dari Gambar 1.1 walaupun persentase penduduk miskin cenderung menurun tetapi laju penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat kecil. Rata-rata setiap tahunnya di tahun 2018-2022 hanya turun sebesar 0,37%.

Faktor-faktor kemiskinan dari sudut pandang ekonomi, yang dijelaskan dalam jurnal (Nugraha, 2020), mengacu pada konsep lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang diperkenalkan oleh Nurkse pada tahun 1953 dan kemudian dikembangkan oleh Sharp, dkk. pada tahun 1996 yaitu:

- a) Dalam lingkup kecil, penyebab terjadinya kemiskinan karena kesenjangan pada kepemilikan sumber daya khususnya pada masyarakat miskin. Kemudian hal tersebut menyebabkan pendapatan penduduk mengalami ketimpangan.

- b) Masyarakat miskin biasanya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Penyebab utamanya karena kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, ketidakberuntungan, diskriminasi, dan faktor keturunan. Kualitas SDM yang rendah mengakibatkan rendahnya produktivitas yang berdampak pada upah yang didapatkan juga rendah.
- c) Adanya perbedaan dalam mendapatkan permodalan.

Adanya ketidakmerataan SDM yang berkualitas biasanya disebabkan adanya perbedaan dalam mengakses sumber daya antara individu satu dengan lainnya. Ketika kualitas sumber daya manusia rendah, ini dapat mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. Manusia berfungsi sebagai modal, sehingga memiliki peranan krusial dalam pembangunan sumber daya manusia.

Teori pembangunan modal manusia menurut Schultz (1961) yang dikutip dalam jurnal (Manginsih., Naukoko., 2022) menyampaikan bahwa manusia menjadi salah satu bentuk modal, sama seperti modal teknologi dan modal fisik. Manusia sebagai modal adalah aspek kualitatif dari sumber daya manusia. Dimensi kualitatif ini mencakup kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu, yang akan berdampak pada tingkat produktivitas mereka dalam lingkup pekerjaan. Melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Hal ini akan menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerjanya. Hal tersebut menimbulkan lebih banyak peluang dalam mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi, jika

hal tersebut terus-menerus terjadi maka pendapatan masyarakat akan membaik dan pada akhirnya dapat menyebabkan seseorang ataupun rumah tangga keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

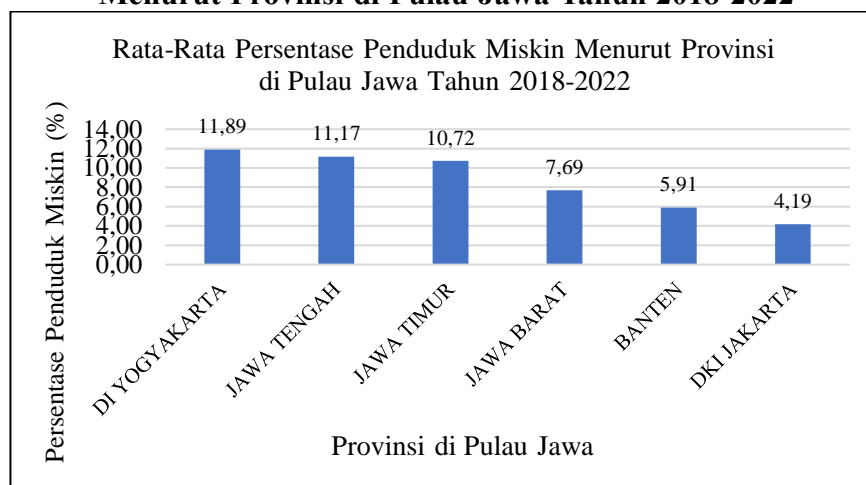
Dalam hal pembangunan modal manusia, kesetaraan gender menjadi hal yang sangat penting. Kembali lagi dalam teori lingkaran setan kemiskinan yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana hal yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM karena adanya perbedaan dalam hal mengakses permodalan seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Maka dari itu, kesetaraan gender sangat perlu dilakukan dalam upaya pembangunan modal manusia. Pembangunan modal manusia harus bersifat inklusif terhadap gender karena semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, semuanya mempunyai kewajiban dan hak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan. Ini merupakan langkah untuk menjadikan SDM berkualitas baik dan menolong mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Kesetaraan gender juga menjadi salah satu capaian pembangunan dalam SDG's.

Saat ini pihak pemerintah sudah sadar mengenai upaya menurunkan tingkat kemiskinan perlu adanya keterlibatan dari semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Agar tingkat kemiskinan menurun, pemerintah berharap masyarakat perempuan juga turut berperan aktif dan produktif dalam aktivitas ekonomi, sehingga dapat memberikan sumbangan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut Adnan (2017) yang dikutip dalam jurnal (Adnan and Amri, 2020), untuk memperbaiki kehidupan masyarakat maka dalam proses pembangunan harus dilakukan dengan cara mendorong kontribusi seluruh masyarakat dan tidak

memandang gender. Oleh karena itu, pemerintah mengimplementasikan sejumlah program untuk memberdayakan ekonomi perempuan, yang tercermin melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang terkait dengan upaya mengurangi kemiskinan. Bahkan, pemerintah telah menetapkan Badan Pemberdayaan Perempuan di beberapa wilayah di Indonesia, menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap kontribusi penting perempuan, terutama dalam konteks ekonomi.

Pulau Jawa menjadi pulau dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sekaligus menjadi letak pusat perekonomian Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, termasuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di pulau lain di Indonesia. Informasi tentang tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut dapat ditemukan dalam gambar 1.2 yang disajikan oleh peneliti. Data tersebut diolah berdasarkan rata-rata persentase penduduk miskin dari tahun 2018 hingga 2022 yang diambil dari situs web BPS.

Gambar 1.2 Grafik Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022



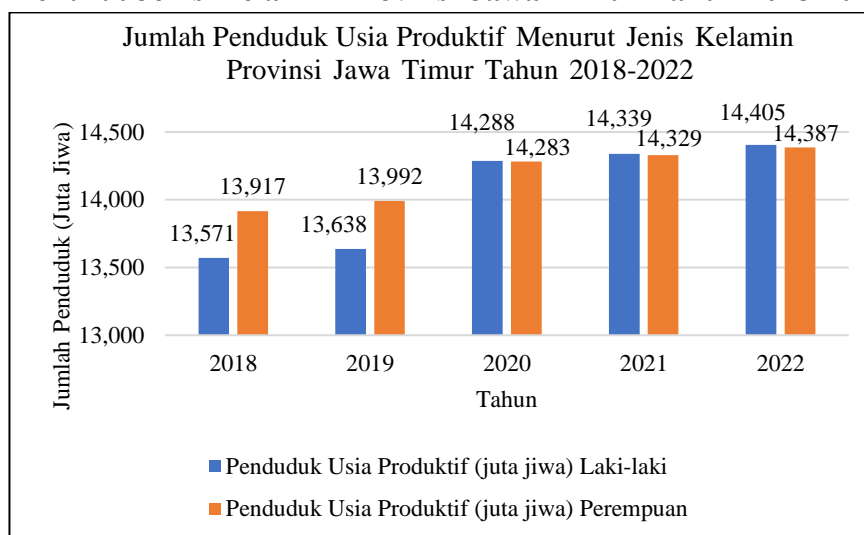
Sumber: BPS, data diolah 2023

Dari gambar 1.2, menunjukkan bahwa rata-rata persentase penduduk miskin Jawa Timur terdapat pada urutan ketiga yaitu sebesar 10,72% dan hanya selisih sedikit dengan DIY dan Jawa Tengah. Dimana selisih Jawa Timur dengan DIY sebesar 1,17% dan selisih antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah hanya 0,45%. Berdasarkan gambar 1.2 memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur termasuk besar. Meskipun demikian, menurut data dari BPS, Jawa Timur menduduki peringkat kedua dalam hal jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat dalam rentang waktu 2018-2022 di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2023). Nilai rata-rata jumlah penduduk di Jawa Timur tahun 2018-2022 sebanyak 40.392,24 ribu jiwa, sedangkan Jawa Barat sebesar 48.792,22 ribu jiwa. Kemudian urutan ketiga hingga keenam yaitu Jawa Tengah dengan 35.840,38 ribu jiwa; Banten dengan 12.292,64 ribu jiwa; DKI Jakarta dengan 10.556,78 ribu jiwa; dan DIY dengan 3.766,08 ribu Jiwa.

Dengan banyaknya jumlah penduduk di Jawa Timur menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian daerah. Maksud dari hal tersebut yaitu dengan banyaknya jumlah penduduk maka sumber daya modal yang dimiliki oleh Jawa Timur juga banyak. Jika hal tersebut dapat dimanfaatkan maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan bahkan juga meningkatkan perekonomian daerah Jawa Timur. Begitu juga sebaliknya, jika banyaknya sumber daya modal manusia tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menambah banyaknya pengangguran yang dapat meningkatkan kemiskinan dan menurunkan tingkat kesejahteraan. Untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan maka jumlah penduduk yang banyak harus diiringi dengan

kualitas SDM yang unggul dan merata. Dalam rentang tahun 2018-2022, data mengenai jumlah penduduk usia produktif (dalam juta jiwa) menurut jenis kelamin di Provinsi Jawa Timur disajikan sebagai berikut.

Gambar 1.3 Grafik Jumlah Penduduk Usia Produktif (Juta Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, data diolah 2023

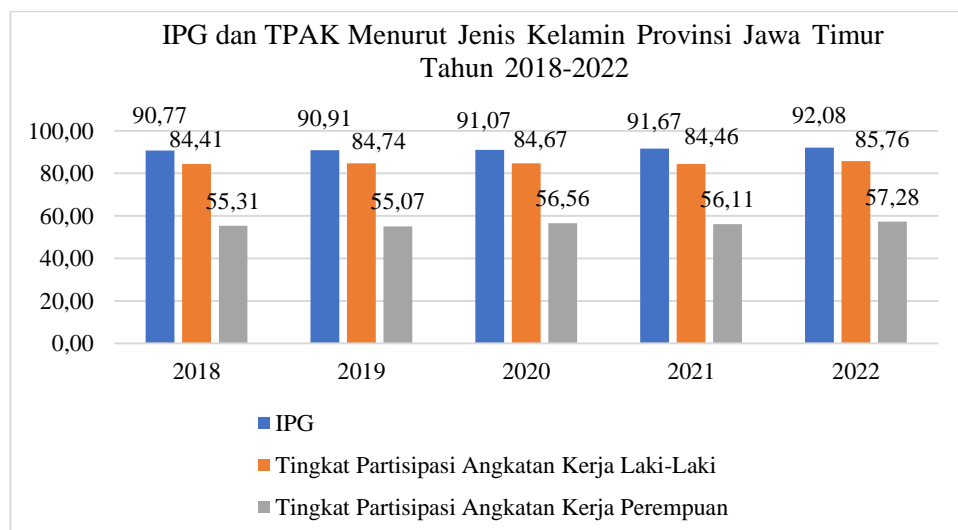
Gambar 1.3 memperlihatkan penduduk usia produktif menurut jenis kelamin di Jawa Timur tahun 2018-2022 sebagian besar berasal dari penduduk berjenis kelamin perempuan. Tahun 2018-2019, penduduk usia produktif di Jawa Timur didominasi oleh penduduk perempuan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk usia produktif berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13,571 juta jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 13,917 juta jiwa. Sementara itu, pada tahun 2019, terdapat 13,638 juta jiwa penduduk usia produktif laki-laki dan 13,992 juta jiwa penduduk usia produktif perempuan. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, penduduk usia produktif di Jawa Timur didominasi oleh laki-laki, meskipun perbedaannya dengan jumlah perempuan hanya sedikit. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif laki-laki adalah 14,288 juta jiwa dan perempuan adalah 14,283 juta jiwa,

hanya berbeda sebesar 0,03%. Kemudian di tahun 2021, penduduk usia produktif laki-laki sebanyak 14,339 juta jiwa hanya selisih 0,06% dari perempuan yaitu sebanyak 14,329 juta jiwa. Selanjutnya di tahun 2022, penduduk usia produktif laki-laki sebanyak 14,405 juta jiwa, selisih 0,12% dari perempuan yaitu sebanyak 14,387 juta jiwa. Meskipun selama tiga tahun terakhir penduduk usia produktif di Jawa Timur didominasi oleh laki-laki, perbedaan dengan jumlah perempuan sangat kecil, bahkan tidak sampai mencapai 1%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir, penduduk usia produktif berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh penduduk perempuan.

Dengan banyaknya penduduk usia produktif berjenis kelamin perempuan di Jawa Timur maka dapat dilihat tingkat kesetaraan gender dalam perekonomian khususnya dalam penurunan tingkat kemiskinan melalui IPG. Menurut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023), Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang memperlihatkan tingkat kesetaraan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati nilai 100, hasil IPG menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin besar. Kesetaraan ini sangat penting dalam pembangunan karena IPM adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikator utama IPM meliputi pendidikan dan kesehatan. Di mana kedua hal tersebut merupakan faktor utama penunjang kualitas SDM karena dengan adanya SDM yang berkualitas, dapat mengeluarkan masyarakat dari lingkaran setan kemiskinan.

Selain itu, dalam aspek ekonomi, indikator kesetaraan gender dapat dikenali melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan jenis kelamin. Menurut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, 2023), TPAK adalah perbandingan antara angkatan kerja dan total populasi usia produktif (15-64 tahun). TPAK mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi. Sehingga dalam kesetaraan gender, perlunya keseimbangan antara penduduk usia produktif menurut jenis kelamin yang dimiliki oleh suatu daerah dengan TPAK menurut jenis kelamin pada daerah tersebut. Jika terdapat banyak penduduk usia produktif perempuan namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) rendah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka bukan merupakan bagian dari angkatan kerja. Mereka masih berstatus sebagai pelajar, ibu rumah tangga, sudah pensiun, atau memilih untuk tidak bekerja, dan sejenisnya. Sehingga mereka tidak berkontribusi pada perekonomian daerahnya melalui dunia kerja.

Gambar 1.4 Grafik IPG dan TPAK Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, data diolah 2023

Dari gambar 1.4 yang disajikan, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan terus menerus. Meskipun demikian, laju kenaikan IPG di Jawa Timur relatif kecil. Pada rentang tahun 2018-2019, IPG hanya meningkat sebesar 0,14; tahun 2019-2020 naik sebesar 0,16; tahun 2020-2021 hanya meningkat 0,16; dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021-2022 sebesar 0,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan keterataan gender melalui perbedaan rasio IPM laki-laki dan IPM perempuan kurang efektif sehingga kenaikannya sangat sedikit. Namun rata-rata IPG Jawa Timur sebesar 91,30 sehingga dapat dikatakan cukup besar yaitu mendekati 100. Hal tersebut menunjukkan rasio antara IPM laki-laki dengan IPM perempuan hampir setara.

Namun jika dilihat dari gambar 1.3 dan gambar 1.4, penduduk usia produktif yang didominasi oleh perempuan dan IPG yang besar tidak sejalan dengan TPAK menurut jenis kelamin di Jawa Timur. Penduduk usia produktif yang dimiliki oleh Jawa Timur tahun 2018-2022 rata-rata sebagian besar berasal dari penduduk berjenis kelamin perempuan. Rata-rata IPG Provinsi Jawa Timur juga termasuk tinggi yaitu 91,30 yang berarti IPM antara perempuan dan laki-laki hampir setara. Namun, TPAK menurut jenis kelamin tahun 2018-2022, masih di dominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki mencapai 84,41, sementara perempuannya 55,31. Di tahun 2019, TPAK laki-laki meningkat menjadi 84,74, sementara perempuannya menurun menjadi 55,07. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki mencapai 84,67, sedangkan perempuannya 56,56.

Selanjutnya, di tahun 2021, TPAK laki-laki adalah 84,46, dan TPAK perempuan 56,11. Pada tahun 2022, TPAK laki-laki dan perempuan mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan TPAK laki-laki sebesar 85,76 dan TPAK perempuan sebesar 57,28. Kenaikan tersebut menunjukkan mulai menambahnya masyarakat yang memilih menjadi angkatan kerja walaupun kenaikannya hanya sedikit.

Rata-rata TPAK menurut jenis kelamin Jawa Timur tahun 2018-2022 yaitu, TPAK laki-laki sebesar 84,81 sedangkan perempuan sebesar 56,07. Hal tersebut menunjukkan bahwa TPAK menurut jenis kelamin perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki padahal penduduk usia produktif di Jawa Timur lebih banyak perempuan. Sehingga banyak penduduk usia produktif atau usia kerja yang memilih menjadi bukan angkatan kerja, atau masih banyak penduduk usia produktif perempuan yang tidak berkontribusi dalam dunia kerja. Padahal seharusnya, dengan adanya penduduk usia produktif perempuan yang banyak dan memiliki perbandingan IPM yang hampir setara dengan laki-laki, dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pendapatan melalui kontribusi dalam dunia kerja. Ketika pendapatan meningkat, tingkat kemiskinan akan cenderung menurun.

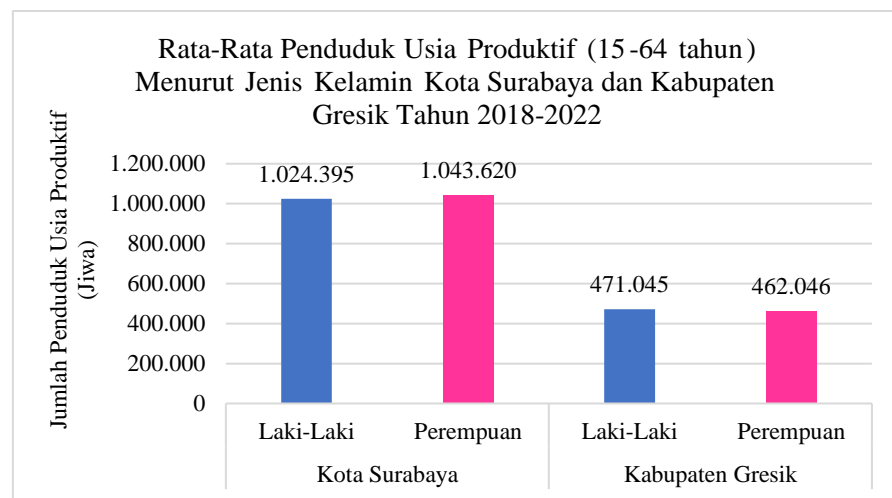
Penelitian ini berfokus pada Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik karena keduanya memiliki populasi yang besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Kota Surabaya, sebagai kota terbesar di Jawa Timur, memiliki populasi penduduk terbanyak pada tahun 2022, sebanyak 2.887.223 jiwa. Sementara Kabupaten Gresik, berada pada peringkat kedelapan dari total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk sebanyak

1.291.518 jiwa pada tahun yang sama. Selain itu, hal yang menyebabkan memilih Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik sebagai fokus objek dari penelitian ini karena kedua daerah tersebut memiliki kesamaan karakteristik yaitu sebagai daerah industri. Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik masuk dalam wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Kota dan Kabupaten Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Gerbangkertosusila merupakan kawasan aglomerasi industri di Jawa Timur. Hal tersebut karena sektor industri menjadi sektor unggulan dalam kawasan tersebut. Di samping itu, karena kedekatan geografis antara daerah-daerah di antara Gerbangkertosusila, terbentuklah sebuah kumpulan industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Wahyuni and Satriawan, 2023). Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang memiliki peluang sebagai daerah industri, seharusnya mampu memanfaatkan peluang tersebut dalam hal tingkat kemiskinan daerahnya.

Dengan adanya jumlah penduduk yang banyak serta Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang merupakan daerah industri, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan melalui adanya kesetaraan gender dalam dunia kerja sehingga baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki usia produktif dapat bekerja khususnya pada sektor industri di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada daerahnya dan juga sebagai bentuk pemanfaatan modal pembangun manusia serta memanfaatkan peluang sebagai daerah industri. Kelompok penduduk usia produktif merujuk kepada individu yang berusia antara 15 hingga 64

tahun dan dianggap memiliki kapasitas untuk menjalani kegiatan sehari-hari secara efektif dan efisien. Sehingga penduduk usia produktif yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian melalui kontribusinya dalam dunia kerja. Data rata-rata penduduk usia produktif (15-64 tahun) berdasarkan jenis kelamin di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik disajikan di bawah ini.

Gambar 1.5 Grafik Rata-Rata Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) Menurut Jenis Kelamin Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



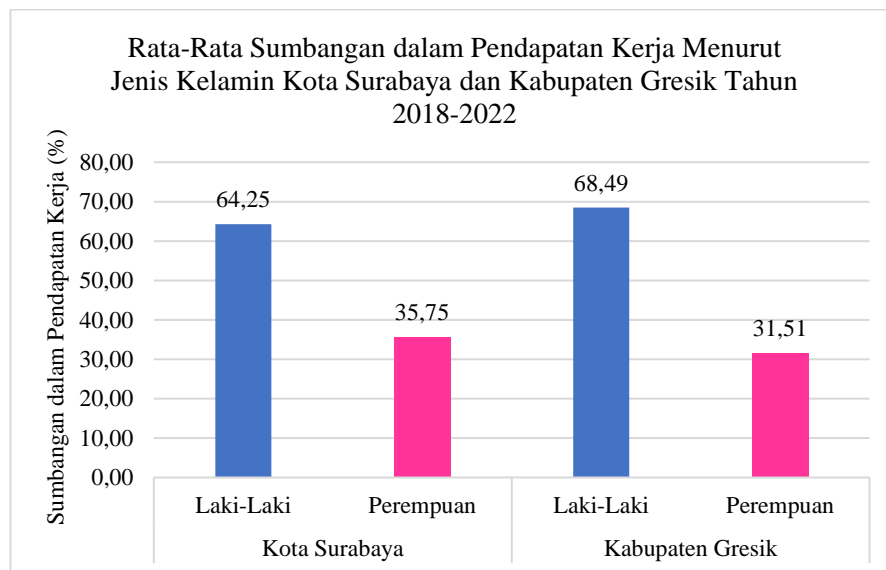
Sumber: BPS, data diolah 2023

Dari gambar 1.5 di atas, terlihat bahwa rata-rata penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Surabaya selama periode 2018-2022 didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah perempuan mencapai 1.043.620 jiwa sedangkan jumlah laki-laki sebesar 1.024.395 jiwa. Di sisi lain, di Kabupaten Gresik, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, namun perbedaannya sangat kecil. Rata-rata penduduk usia produktif laki-laki mencapai 471.045 jiwa dan perempuan 462.046 jiwa, dengan selisih hanya sebesar 1,95%. Dari adanya penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk usia produktif menurut jenis kelamin yang dimiliki oleh di Kota Surabaya didominasi oleh perempuan sedangkan

di Kabupaten Gresik lebih besar laki-laki namun hanya selisih sedikit dengan perempuan atau dapat dikatakan jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Kabupaten Gresik antara laki-laki dan perempuan hampir sama banyaknya.

Dengan banyaknya penduduk usia produktif berjenis kelamin perempuan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik maka dapat dilihat tingkat kesetaraan gender dalam perekonomian melalui rata-rata sumbangan pendapatan dalam kerja menurut jenis kelamin di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik tahun 2018-2022 berikut.

Gambar 1.6 Grafik Rata-Rata Sumbangan dalam Pendapatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, data diolah 2023

Gambar 1.6 di atas menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan dalam pendapatan kerja di tahun 2018-2022 Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik lebih besar laki-laki dibanding perempuan. Sumbangan pendapatan dalam kerja Kota Surabaya berjenis kelamin laki-laki sebesar 64,25% dan perempuan hanya 35,75%. Sumbangan pendapatan dalam kerja Kabupaten

Gresik berjenis kelamin laki-laki sebesar 68,49%% dan perempuan hanya 31,51%. Di kedua daerah tersebut, perbandingan antara sumbangan dalam pendapatan kerja laki-laki dan perempuan cukup jauh jaraknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dunia kerja, penduduk yang lebih banyak berkontribusi melalui sumbangan pendapatan yaitu penduduk laki-laki, sedangkan perempuan hanya sekitar 30-an%.

Dari penjelasan yang disajikan dalam gambar 1.5 dan 1.6, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara data sumbangan pendapatan dalam pekerjaan menurut jenis kelamin tahun 2018-2022 dengan data penduduk usia (15-64 tahun) menurut jenis kelamin pada periode yang sama. Seharusnya dengan banyaknya penduduk usia produktif perempuan maka dalam hal sumbangan dalam pendapatan kerja juga lebih banyak perempuan. Namun di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik berbeda, justru lebih banyak atau lebih besar berasal dari penduduk laki-laki. Ini menandakan bahwa meskipun banyaknya penduduk perempuan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, mereka masih belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian daerah mereka. Seharusnya, dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjenis kelamin perempuan yang besar, mereka seharusnya dapat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, terutama karena kedua wilayah tersebut merupakan daerah industri yang menawarkan banyak lapangan kerja.

Gambar 1.7 menunjukkan kondisi tingkat kemiskinan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik selama periode 2018-2022:

Gambar 1.7 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, data diolah 2023

Dari gambar grafik 1.7 yang telah dipaparkan sebelumnya, memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik periode 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018-2019, persentase penduduk miskin di Kota Surabaya menurun dari 4,88% menjadi 4,51%, sedangkan di Kabupaten Gresik turun dari 11,89% menjadi 11,35%. Namun, pada periode 2019-2021, baik Kota Surabaya maupun Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin di Kota Surabaya meningkat dari 4,51% pada tahun 2019, naik 0,51% menjadi 5,02% pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi 5,23% pada tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Gresik dari tahun 2019 sebesar 11,35%, naik sebesar 1,05% menjadi 12,40% di tahun 2020 dan naik lagi di tahun 2021 menjadi 12,42%. Kenaikan persentase penduduk miskin di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik tahun 2019-2021

merupakan salah satu dampak pandemi covid-19 sehingga banyak penduduk yang diPHK dan pendapatan penduduk menurun sehingga kemiskinan meningkat. Namun di tahun 2022, kedua daerah tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan di mana tingkat kemiskinan Kota Surabaya menjadi sebesar 4,72% dan Kabupaten Gresik sebesar 11,06%. Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik saat ini terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memulihkan perekonomian akibat dampak pandemi covid-19. Salah satu ide untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik adalah dengan meningkatkan pemanfaatan jumlah penduduk usia produktif dari semua gender. Dari data yang telah disampaikan sebelumnya, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik memiliki penduduk usia produktif perempuan yang masih belum dimaksimalkan dalam berkontribusi meningkatkan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dari adanya fenomena tersebut, menjadi menarik untuk membahas apakah memang terdapat pengaruh antara kesetaraan gender terhadap penurunan tingkat kemiskinan atau tidak di antara kedua daerah tersebut. Selain itu juga untuk membahas mengenai apakah terdapat perbedaan pengaruh antara kesetaraan gender terhadap penurunan tingkat kemiskinan di antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dimana kedua daerah tersebut memiliki kesamaan karakteristik yaitu sebagai daerah industri. Adanya jawaban tersebut dapat dijadikan landasan pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dalam membuat kebijakan ataupun program pengentasan kemiskinan melalui kesetaraan gender.

Dalam penelitian yang berjudul "Apakah Pendapatan Perempuan Dapat Mengurangi Kemiskinan? Bukti data Panel di Indonesia," yang dilakukan pada tahun 2020, Gunawan Adnan dan Khairul Amri menggunakan pendekatan *fixed effect* dalam metode analisis regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari sumbangan pendapatan perempuan (X) terhadap tingkat kemiskinan (Y) (Adnan and Amri, 2020). Sedangkan penelitian berjudul "Apakah IPM, Pengangguran, dan Pendapatan Perempuan Berpengaruh dalam Menurunkan Kemiskinan di Kota Surabaya?" yang dilaksanakan oleh Salva Aulia Abda dan Hendry Cahyono pada tahun 2022 menggunakan metode analisis regresi berganda, ditemukan bahwa IPM (X_1), tingkat pengangguran terbuka (X_2), dan sumbangan pendapatan perempuan (X_3) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kota Surabaya. Secara individu, Indeks Pembangunan Manusia (X_1) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y), sedangkan tingkat pengangguran terbuka (X_2) memberikan pengaruh positif yang signifikan. Namun, sumbangan pendapatan perempuan (X_3) tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan tingkat kemiskinan (Y) (Abda, Salva Aulia & Cahyono, 2022).

Dalam penelitian milik Zulfakhri Auzar tahun 2021 dengan judul "Kemiskinan, Gender, dan Covid-19 Jatim: *Feminization of Poverty, Multiple Pandemic, and Feminization of Pandemic*" menggunakan metode analisis regresi data panel dan uji t menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari IDG (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y). Hal yang sama

berlaku untuk IPM_PR (X_2), IPM_LK (X_3), dan IPG (X_4) (Auzar, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Via Aprilia dan Mike Triani pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender, Rasio Ketergantungan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia” menggunakan model regresi panel dengan pendekatan *Random Effect Model (REM)*. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan adanya pengaruh signifikan dari IPG (X_1), rasio ketergantungan (X_2), dan UHH (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Indonesia. Secara parsial, terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari IPG (X_1) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Y). Selain itu, terdapat pengaruh positif yang tidak signifikan dari rasio ketergantungan (X_2) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Y), dan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari UHH (X_3) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Y) (Aprilia and Triani, 2022).

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, menarik untuk mengangkat topik tentang kesetaraan gender dan penurunan kemiskinan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Penelitian ini akan menganalisis dampak dari sumbangan pendapatan perempuan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Sehingga diangkat judul **“Peran Kesetaraan Gender Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbandingan antara dua wilayah, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Kedua daerah ini memiliki karakteristik serupa sebagai daerah industri, yang

seharusnya memberikan banyak lapangan pekerjaan dan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di kedua daerah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan permasalahan berikut ini:

1. Apakah sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya?
2. Apakah sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
3. Apakah Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya?
4. Apakah Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
5. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya?
6. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
7. Bagaimana perbandingan pengaruh sumbangan pendapatan perempuan terhadap tingkat kemiskinan di antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik?
8. Bagaimana perbandingan pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap tingkat kemiskinan di antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik?

9. Bagaimana perbandingan pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap tingkat kemiskinan di antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang dan merumuskan masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sumbangan pendapatan perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh sumbangan pendapatan perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
5. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya.
6. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
7. Untuk mengetahui perbandingan pengaruh sumbangan pendapatan perempuan terhadap tingkat kemiskinan di antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

8. Untuk mengetahui perbandingan pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap tingkat kemiskinan di antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
9. Untuk mengetahui perbandingan pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap tingkat kemiskinan di antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menekankan pada analisis dampak sumbangan pendapatan perempuan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pengangguran, tetapi juga dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari seluruh masyarakat dalam meningkatkan atau memperoleh pendapatan. Seluruh penduduk yang dimiliki oleh suatu negara atau daerah merupakan modal dari pembangunan ekonomi. Manusia atau seluruh penduduk merupakan modal fisik ataupun teknologi dalam usaha seperti menjadi tenaga kerja dimana hal tersebut artinya manusia ikut serta dalam pembangunan nasional maupun daerah. Dari hal tersebut maka semua penduduk tidak boleh memandang gender, harus berkontribusi dalam pembangunan nasional maupun daerah khususnya dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan. Maka dari itu dalam penurunan tingkat kemiskinan perlu adanya kesetaraan gender. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumbangan pendapatan perempuan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, serta

persentase penduduk miskin. Data ini diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Badan Pusat Statistik Jawa Timur, dan Badan Pusat Statistik Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan data Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik secara time series dari tahun 2010-2022 kecuali tahun 2016 karena di tahun tersebut data sumbangan pendapatan perempuan, IPG, dan TPAK perempuan tidak diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang disebabkan oleh adanya pengurangan sampel SAKERNAS (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023). Semoga penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta program-program yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan melalui kesetaraan gender secara optimal. Dengan demikian, kesejahteraan manusia dapat meningkat dan merata secara signifikan.

1.5. Manfaat Penelitian

Harapannya, mengenai tujuan penelitian tersebut, dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pada pengetahuan tentang penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, terutama di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, melalui implementasi kesetaraan gender dana dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan kebijakan atau program yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan melalui penerapan kesetaraan gender di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
- b) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan tambahan wawasan peneliti, terutama mengenai konteks penerapan ilmu pengetahuan terkait penurunan tingkat kemiskinan melalui upaya kesetaraan gender di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik..
- c) Bagi Pembaca, hasil penelitian ini dianggap sebagai materi informasi yang dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai titik perbandingan untuk penelitian di masa yang akan datang.